

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS  
MULTIKULTURAL TERHADAP SIKAP TOLERANSI SISWA SMA  
NEGERI DI KOTA SURAKARTA**

Agatha Kristi

*Prodi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta*  
agathakristi@student.uns.ac.id

**ABSTRAK**

SMA Negeri merupakan suatu jenjang pendidikan formal menengah atas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan umumnya terdapat peserta didik atau siswa dari berbagai latar belakang yang beragam. Dapat dilihat dari keberagaman latar belakang siswa baik secara ekonomi, agama, suku, ras. Untuk sekolah SMA Negeri di kota Surakarta khususnya dimana kota yang sering mendapat julukan Kota Budaya ini terlihat jelas memiliki keberagaman agama, etnis, dan ras. Skor indeks Kota Surakarta menurut peneliti Setara Institute berdasar dari data BPS menempatkan Surakarta masuk ke dalam 10 besar kota memiliki indeks toleransi tertinggi. Dan menurut data BPS pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda di Surakarta adalah Sekolah Menengah Atas/ sederajat dengan presentase 46,25%. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana implementasi pendidikan multikultural di SMA Negeri Surakarta? Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui implementasi pendidikan multikultural SMA Negeri di Surakarta. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus berdasar teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pendidikan multikultural terimplementasikan didalam pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan berbasis multikultural dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga tertuang didalam kurikulum 2004 (KTSP) maupun kurikulum yang dipakai sekarang yaitu kurikulum 2013.

**Kata kunci :** pendidikan multikultural, sikap toleransi, siswa SMA

**ABSTRACT**

*Public high school is a level of senior secondary education organized by the government and generally there are students or students from various diverse backgrounds. Can be seen from the diversity of students' backgrounds both economically, religiously, ethnically, racially. For public high school schools in the city of Surakarta, especially where cities that often get the nickname of the City of Culture clearly seen having a diversity of religions, ethnicities, and races. The Surakarta City index score according to Equivalent Research Institute based on BPS data puts Surakarta in the top 10 cities with the highest tolerance index. And according to BPS data, the highest education achieved by youth in Surakarta is High School / equivalent with a percentage of 46.25%. The problems that will be raised in this study include: How is the implementation of multicultural education in Surakarta State High School? The purpose of this study is to find out the implementation of multicultural education in State High Schools in Surakarta. The research method is a qualitative research method with a case study based on data collection techniques through literature studies and observations. The results of this study are that multicultural education is implemented in learning on religious subjects, Civics, and Languages. Multicultural-based education in Citizenship Education subjects is also contained in the 2004 curriculum (KTSP) and the curriculum currently in use, namely the 2013 curriculum.*

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

**Keyword:** *multicultural education, tolerance, high school students*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, adat, ras, bahasa, agama dan budaya. Terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia dikarenakan factor geografis yang memiliki pengaruh besar. [12] Diversitas menyebabkan terjadinya isolasi budaya, meskipun budaya dari setiap pulau-pulau berbeda namun tetap memiliki akar yang sama. Penyebabnya dari perbedaan tersebut ditemukan pada etnik. [19] Banyak nama etnik yang disamakan dengan nama daerah asalnya, bahkan menunjukkan nama dari kebudayaannya. [16] Pada penelitian Yu-le Jin, dkk (2014) berjudul *Chinese Multi- Cultural Education: Possibilities and Paths*, menjelaskan bahwa dalam membangun pendidikan multi budaya di Cina dengan menunjukkan kemungkinan membangun pendidikan multi budaya Cina. "Persatuan tanpa keseragaman" dengan kedatangan era multi budaya dan ideal pendidikan. [21]

Multikulturalisme merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai, dan menjadi potensi yang harus dikembangkan dan dibimbing. Sebaliknya jika keberagaman tidak dimanfaatkan dan dibimbing dengan benar akan berkembang menjadi suatu yang menakutkan. Maka dari karena itu pendidikan yang berbasis multikultural adalah suatu keharusan untuk membimbing keberagaman tersebut. Dulu keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun berdasarkan tujuan dan juga kepentingan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia sangat plural, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam membina keberagaman masyarakat di Indonesia tersebut dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalamnya, dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah Mengetahui implementasi pendidikan multikultural SMA Negeri di Surakarta dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia khususnya di kota Surakarta. [5]

Kota Surakarta juga salahsatu kota yang memiliki keberagaman terutama yang terlihat jelas adalah keberagaman agama dan ras. Berdasarkan data dari didukcapil kota Surakarta rata-rata penduduk memiliki kepercayaan yang dipercayai dari tujuh agama besar yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan kepercayaan lainnya. Dengan Penduduk mayoritas adalah muslim. Tabel 1.1 [8] dan Tabel 1.2 jumlah Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Surakarta pada setiap Kecamatan. [9]

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
 Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

No.	Agama	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1.	Islam	219.908	79,05 %	222.058	77,74 %	441,996	78,39 %
2.	Kristen	38.025	13,67 %	41.342	14,47 %	79.367	14,08 %
3.	Khatolik	19.340	6,95 %	21.264	7,44 %	40.604	7,20 %
4.	Hindu	181	0,07 %	190	0,07 %	371	0,07 %
5.	Budha	658	0,24 %	708	0,25 %	1.366	0,24 %
6.	Konghuchu	62	0,02 %	57	0,02 %	119	0,02 %
7.	Kepercayaa n	13	0,00 %	8	0,00 %	21	0,00 %
Jumlah		278.187	100,00 %	285.627	100,00 %	563.814	100,00 %

Tabel 1.1 Sumber: Disdukcapil Surakarta

**Banyaknya SMA di Kota Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017**

Kecamatan 1	Banyaknya Sekolah SMA				
	Sekolah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	10	10	9	9	15
Serengan	1	1	1	1	10
Pasar Kliwon	4	4	4	4	10
Jebres	7	7	7	7	17
Banjarsari	12	12	13	13	23

Tabel 1.2 Sumber: BPS kota Surakarta

Pendidikan adalah salah satu cara menanamkan nilai toleransi dari keberagaman yang ada. Demikian halnya dengan pembangunan pendidikan, harus merancang suatu model pendidikan yang dapat menghasilkan luaran karakter berbasis nilai moral dan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu contoh SMA Negeri di kota Solo memiliki latar belakang guru dan siswa yang umumnya beragam, dari segi social ekonomi, suku ataupun agama. Keberagaman tersebut tidak hanya terdapat di lingkungan sekolah, akan tetapi juga pada lingkup tiap-tiap kelas. Kurikulum di SMA Negeri kota Solo berpedoman pada kurikulum

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

nasional. Dengan menyelenggarakan muatan kurikulum local berdasar dapa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 895/01/2005. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Jawa Tengah dalam upaya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan penguatan Bahasa Jawa. Selain melalui pendidikan muatan local yang dituangkan dalam pelajaran bahasa jawa, mata pelajaran yang berberan dalam penanaman nilai toleransi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang bisa digambarkan dengan warga negara yang berjiwa patriotik, memiliki rasa toleransi yang tinggi, setia kepada bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasila. [17]

### **Metode**

Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif Metode penelitian naturalistik atau kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan karena pengumpulan data bersifat *emic*, yaitu berdasar pada pandangan dari sumber data, bukan dari pandangan peneliti. [18] Penelitian kualitatif tersebut diperoleh dengan studi kasus berdasar teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

### **Hasil**

#### **Muatan Pendidikan Multikultural dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Berdasarkan hasil dari observasi lapangan mayoritas SMA Negeri di kota Surakarta telah menerapkan kurikulum 2013 yang sebelumnya menerapkan kurikulum 2004 atau KTSP. Berdasarkan paparan Wamendikbud alasan untuk pengembangan kurikulum antara lain karena adanya persepsi masyarakat, perkembangan penegetahuan dan pedagogi, serta fenomena negative yang mengemuka. Persepsi pertama adalah persepsi dari masyarakat antara lain : 1) Terlalu menitiberatkan kepada aspek kognitif (penegetahuan), 2) Beban siswa yang terlalu berat, 3) Kurang bermuatan karakter. Perkembangan pengetahuan dan juga pedagogi meliputi : 1) Neurologi, 2) Psikologi, 3) Observation based (discovery) learning and collaborative learning. Berdasar fenomena negative yang mengemuka antara lain :1) Perkelahian pelajar, 2) Narkoba, 3) Korupsi, 4) Plagiarisme, 5) Kecurangan dalam ujian 6) Gejala masyarakat (social unrest).

Dalam muatan pendidikan multicultural antara muatan kurikulum 2004 (KTSP) yang dahulu digunakan dengan kurikulum 2013 memiliki intisari yang hamper sama namun untuk kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter dan tidak hanya berpusat pada kognitif saja.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
 Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Melalui pendidikan Karakter berbasis nilai-nilai diharapkan pendidikan karakter bagi generasi bangsa dapat mengembalikan peran generasi bangsa dalam pembangunan karakter bangsa, yakni perannya sebagai patriotis, nasionalis

yang inklusif, intelektualis yang moralis. Dengan bersumber pada nilai luhur bangsa dan tiga kompetensi di atas, pendidikan karakter sebagai wahana program sistemik pembelajaran moral dan kebangsaan, dapat turut membentuk karakter generasi bangsa yang mampu: (1) mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dan menghargai keberagaman agama, suku, ras, dan golongan sosial-ekonomi lainnya; (2) mematuhi aturan-aturan, norma dan peraturan hukum yang berlaku; (3) kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah sosial-budaya bangsa; (4) demokratis dengan menghargai keberbedaan dan mau menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan bangsa; (5) mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (6) memiliki nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI; (7) memiliki nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai jatidiri kebangsaannya. [6]

Tabel 1.3 Muatan Pendidikan Multikultural dalam mata pelajaran Kewarganegaraan 2004 (H.A Dardiri hasyim, Yudi Hartono. Pendidikan Multikultural disekolah) [7]

No	Muatan Materi Pendidikan Multikultural	Indikator	Kelas
1.	Budaya Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan bahwa warganegara yang demokrasi bergantung pada budaya demokrasi yang sehat.</li> <li>• Mengidentifikasi perilaku, praktik, dan norma yang mendukung budaya demokrasi.</li> <li>• Mendiskusikan bagaimana peranan pendidikan untuk menghasilkan warganegara yang bebas,</li> </ul>	XI

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
 Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

		<p>mau bertanya, kritis-analitis, dan memahami ajaran dan praktik budaya demokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan bagaimana kasus terjadinya konflik akibat berbagai keinginan manusia yang kadang-kadang saling bertentangan.</li> <li>• Menganalisis perlunya perlakuan social yang tepat untuk mengurangi berbagai konflik melalui mufakat, koalisi, dan consensus.</li> <li>• Menganalisis pentingnya warganegara dan masyarakat yang cerdas dalam upaya mewujudkan budaya demokrasi.</li> </ul>	
2.	Pluralisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi bentuk-bentuk keanekaragaman dalam kehidupan manusia.</li> <li>• Menjelaskan dampak campur tangan Negara yang membatasi keanekaragaman gagasan atau pemikiran warganegara.</li> <li>• Mendiskusikan keanekaragaman sebagai modal bagi peningkatan kemajuan masyarakat.</li> <li>• Menjelaskan prinsip demokrasi yang mengutamakan perlindungan pluralism.</li> <li>• Menganalisis peranan</li> </ul>	XI

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
 Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

		pemerintah dalam Negara yang pluralistis.	
3.	Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan hakikat semua manusia diciptakan sama dan diberikan hak-hak tertentu yang tidak bias dicabut.</li> <li>• Menjelaskan peranan pemerintah dalam melindungi hak dan kebebasan warga Negara.</li> <li>• Mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.</li> <li>• Menganalisis bagaimana dampak kebebasan berbicara dan berpendapat yang tidak tersalurkan secara benar dan kondusif.</li> </ul>	XII
4.	Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan cara-cara bagaimana melaksanakan HAM dan memantau pelaksanaannya.</li> <li>• ]menjelaskan peranan media massa dalam rangka pelaksanaannya.</li> <li>• Mengidentifikasi perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM.</li> <li>• Mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Negara-negara lain.</li> <li>• Menganalisis dan mempertahankan posisi tentang adanya anggapan bahwa HAM mengandung nuansa perbedaan antara suatu bangsa dengan</li> </ul>	XII

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
 Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

		bangsa lain. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan teori John Locke yang mendasari pengembangan teori dan praktik HAM.</li> </ul>	

Muatan Pendidikan Multikultural dalam Mata pelajaran PPKn 2013 Berdasar paparan Wamendikbud [11]

Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
X-XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</li> <li>- Menyajikan bentuk dan kedaulatan Negara berdasarkan UUD 1945.</li> <li>- Menunjukkan sikap positif kepada NKRI dilihat dari aspek geopolitik.</li> <li>- Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender</li> <li>- Mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil</li> <li>- Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.</li> <li>- Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integritas nasional dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.</li> <li>- Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia.</li> </ul>
XII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan sikap positif terhadap nilai fundamental,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila</li> </ul>



Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
 Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

	instruuementaldan praksis sila-sila Pancasila. - Menganalisis pengelolaan kekuasaan Negara sesuai dengan UUD 1945. - Menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam Bhineka Tunggal Ika. - Menganalisis penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal. - Mengamalkan nilai, moral, norma, prisip, spirit dan tanggungjawab (makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban	Pancasila - Dinamika pelaksanaan pasal- pasal yang mengatur tentang keuangan Negara dan kekuasaan kehakiman - Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara serta penanganannya. - Strategi yang diterapkan dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhineka Tunggal Ika. - Dinamika penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Problematika dan Permasalahan Pendidikan Multikultural

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang pendidikan juga memberikan dampak negatif dan juga memunculkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak nyatanya adalah gagalnya penanaman pendidikan multikultural dan juga identitas nasional yang mulai luntur dalam diri generasi muda khususnya pada anak usia sekolah didalam melalui era globalisasi sekarang ini.

Hal tersebut terbukti nyata dengan adanya tawuran antar sekolah, diskriminasi kaum minoritas/*bullying* di lingkungan pendidikan, fanatisme, radikalisme yang saat ini menjadi permasalahan dilingkungan pendidikan, lunturnya rasa toleransi, pandangan stereotype terhadap budaya atau suku yang berbeda, seks bebas atau pornografi dan juga tindakan kriminal yang banyak

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

dilakukan oleh generasi muda terutama pada usia sekolah. Faktor-faktor dasar yang menyebabkan munculnya berbagai tindakan kekerasan dapat dirumuskan sebagai berikut (Armando Ariyanto, 1998):

1. Kesenjangan dan atau kecemburuan sosial yang tidak dapat dipecahkan dengan pengusuran atau menghilangkan orang lain
2. Memperjuangkan demokrasi serta keadilan, walaupun antara demokrasi dan kekerasan merupakan sebuah kontradiksi. Karena demokrasi adalah perwujudan kebebasan didalam mencapai keadilan, sedangkan kekerasan justru menyebarkan ketakutan serta konflik yang tidak menentu yang lebih berakar pada sempitnya pandangan individu.
3. Kekerasan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa.
4. Kekerasan merupakan tindakan spontan secara emosional individu ataupun kelompok.
5. Konflik antar agama, organisasi, kelompok suku bangsa, dan fanatisme yang berlebihan (Drs.Achmad Hufad).

Sementara itu menurut Kepala Badan Bahasa kemendikbud pada tahun 2018, bahwa ada 19 bahasa daerah yang sudah terancam punah, 4 bahasa kritis, serta 2 bahasa mengalami kemunduran, 16 bahasa dalam kondisi rentan, dan 19 berstatus aman (Kemendikbud).

Adapun faktor lain yang menyebabkan pudarnya identitas nasional bangsa Indonesia antara lain:

1. Permasalahan dengan negar-negara lain.
2. Percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah.
3. Kecenderungan untuk lebih bangga menggunakan apapun yang berasal dari luar.
4. Lunturnya semangat generasi muda untuk mewarisi budaya asli Indonesia.
5. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya identitas nasional.
6. Terbukanya akses untuk mengetahui berbagai kebudayaan yang ada diluar Indonesia.

### **Pendidikan Multikultural Sebagai Identitas Nasional**

Dalam perspektif kebudayaan, maka multikultural merupakan suatu bentuk pandangan yang mengedepankan asas kebersamaan, pandangan ini umumnya dipengaruhi dari realitas sejarah dan kondisi dari berbagai perbedaan yang dapat dijadikan alat ataupun wahana dalam meningkatkan derajat manusia serta kemanusiaanya. [14]

Kata pendidikan dan multikultural memberikan artian bahwa pada dasarnya pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi siswa melalui penerapan konsep pendidikan yang berbasis pada

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

pemanfaat keanekaragaman di lingkungan masyarakat, terkhusus yang ada pada siswa seperti keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, status sosial, gender, suku dan ras kemampuan dan umur.

Dalam penerapan pendidikan multikultural, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari di dalam kelas, akan tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis yang menjadi nilai utama dalam bersosial di lingkungan dimanapun ia berada. [2] Pada pendidikan multikultural juga menekankan pada filosofi pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghargai dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial yang dapat dijadikan nilai utama sehingga mampu menjawab berbagai konflik horizontal dan vertikal dalam dunia pendidikan di era globalisasi.

Lawrence Blum membagi tiga elemen dalam pendidikan multikultural, 1) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari serta menilai warisan budaya seseorang. 2) menghormati dan juga berkeinginan untuk memahami serta keinginan belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaannya. 3) menilai dan merasa senang dengan adanya perbedaan pada kebudayaan itu sendiri; yaitu dengan memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara [1] . Disisi lain dijelaskan oleh Callary Sada bahwa pendidikan multikultural itu mempunyai empat makna pengajaran, antara lain:

1. Pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural
2. Pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial
3. Pengajaran untuk memajukan nilai pluralisme tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat
4. Pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan nilai pluralisme dan nilai persamaan [3] .

Sedangkan identitas nasional sendiri yaitu bahwa identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh serta berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas, serta dengan ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain di dalam kehidupannya. [10] Jadi dalam hal ini bangsa Indonesia dengan berbagai macam nilai luhur budayanya [4] . Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat pada suatu Negara, tercermin di dalam identitas nasional bukanlah suatu barang yang sudah jadi dalam kebakuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka dan cenderung terus menerus berkembang termasuk di era globalisasi. Karena keinginan untuk maju yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Lebih lanjut bahwa konsep dari identitas nasional merupakan sebuah konsep yang multidimensional dimana dikembangkan serta dianalisis kedalam berbagai disiplin ilmu serta relevan dengan berbagai bidang penelitian. Identitas Nasional merupakan bentuk dari identitas sosial. Identitas Nasional dianggap menjadi konsep utama dari identifikasi individu pada tiap kelompok sosial dalam dunia modern, kedekatan anggota kelompok terhadap negara mereka digambarkan dengan rasa saling memiliki, loyalitas, kebanggaan, serta perlindungan terhadap kelompok dan juga tanah airnya.

### **Penguatan Pendidikan Multikultural Dengan nilai Toleransi**

Salah satu upaya awal dalam penanganan masalah dan tantangan pendidikan di Indonesia yaitu bagaimana proses penanaman nilai etika dalam diri anak usia sekolah, ada beberapa aspek yang dipandang penting dan dipertimbangkan berkenaan dengan pemilihan etika pada konteks pluralisme. 1) karena masalah hubungan sosial antar sesama manusia merupakan wilayah kajian etika, yakni bagaimana sikap manusia memperlakukan manusia lain yang berbeda latar belakang. 2) dari segi etika sendiri menekankan bahwa etika sangat penting karena merupakan solusi untuk dalam mengatasi berbagai pertimbangan, keputusan, dan kepastian moral secara rasional dan objektif tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam bersosial dalam lingkungan baik di lingkungan keluarga, pendidikan, serta masyarakat. [13]

Penguatan pendidikan multicultural salah satu kunci utamanya adalah sikap toleransi. Kewajiban menjalankan toleransi agama bertitik tolak dari keyakinan yang melekat dalam hati nurani manusia oleh karena itu keyakinan agama bukanlah suatu yang dipaksakan. Bahwa dari pembelajaran PKn yang menyenangkan bagi siswa ini berarti bahwa guru bidang studi PKN dapat mengajar mata pelajaran yang dibawakannya sesuai dengan tujuan dari kurikulum, baik dalam penyampaian materi, akan terjalin suatu interaksi yang harmonis antara guru dengan siswa. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan menetapkan suatu penghayatan serta pengamalan Pancasila. Dalam hal ini pembinaan sikap toleransi antar siswa sangat berpengaruh dan terbukti sebagaimana kita ketahui bahwa toleransi adalah syarat mutlak dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Serta dengan demikian bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk/plural karena memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip dari organisasi komunitas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, fungsi komunitas sosial berfungsi sebagai pelindung dan pemelihara norma, nilai, dan etika dalam kehidupan sosial dan bernegara. Dengan demikian,

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

kegiatan organisasi kemasyarakatan adalah dalam bentuk kegiatan yang dapat melindungi dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. [20]

Dengan demikian pula dalam memeluk agama serta menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu tidak harus dipertahankan karena agama dan kepercayaan, karena hal tersebut bukanlah suatu yang dipaksakan sehingga didalam diri harus memiliki nilai toleransi. Toleransi beragama yang harus dimiliki adalah tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama. Kemurnian ajaran agama kita harus tetap dijaga dan dipertahankan. Pelajaran PKn sangat berhubungan dengan pelajaran agama, karena dalam pelajaran tersebut sama-sama mempelajari sikap dan perilaku manusia.

Kebebasan beragama terjamin pelaksanaannya Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yaitu: setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik seagama. [15]

Guru tidak boleh melarang siswa untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama. Majemuk/beragam merupakan ciri yang melekat pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemajemukan dalam hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahasa dan budaya daerah serta suku dan ras dengan adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian dalam memeluk agama menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu melengkapi, persamaan itu menyatukan sehingga dengan memiliki perbedaan ataupun persamaan tetap merupakan satu yaitu Indonesia.

### **Simpulan :**

Pada umumnya penanaman nilai toleransi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik dari kurikulum 2004 (KTSP) maupun kurikulum 2013 memiliki intisari muatan pendidikan multicultural yang terkandung didalam mata pelajaran tersebut yaitu antara lain materi demokrasi, pluralisme/keberagaman, dan juga Hak Asasi Manusia. Pada muatan pendidikan multikultural table kurikulum 2004 rumusan indicator masih terbatas pada aspek kognitif dan belum menyentuh pada aspek afektif maupun psikomotorik. Karena belum ada rumusan yang implementatif. Penanaman nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat didalam muatan materi baik kurikulum 2004 ataupun 2013 ,pada SMA Negeri di kota Surakarta sendiri telah menerapkan kurikulum 2013 dan penanaman nilai-nilai toleransi ditanamkan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Problematika multicultural memang seringkali masih terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi masih dapat diatasi dengan penanaman nilai

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

yaitu antara Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan dalam perspektif bernegara di Negara yang plural. Serta pendidikan Agama sebagai landasan dalam perspektif kepercayaan. Dan Bahasa Indonesia yang menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia dalam berkomunikasi, serta bahasa daerah yang merupakan keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dari hal tersebut semua harus dibungkus dengan nilai toleransi yaitu saling menghargai dan menghormati tentang apa yang dianut, dipercaya dan dimiliki sekarang ini. Terutama siswa SMA di Surakarta yang dilingkungannya majemuk serta beragam, sehingga mengharuskan bagaimana dapat terjalin sinergitas dalam proses belajar mengajar di sekolah yaitu dengan menerapkan nilai toleransi.

**Daftar Pustaka :**

- [1] A. Lawrence Blum. 2001. *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins- Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 19.
- [2] Ainul Yaqin, M, 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media. Hlm 5.
- [3] Clarry Sada. 2004. *Multivultural Education in Kalimantan Barat, an Overview*. Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia Edisi pertama. Hlm 85.
- [4] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. 2012. *Hibah Pembelajaran Non Konvensional: Identitas Nasional (Bahan Ajar)*. Universitas Ahmad Dahlan. Hlm. 4.
- [5] Dwintari Julita Widya. *Journal Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [6] Harahap Zulhamdi Hasian. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Moral dan Nilai Kebangsaan*. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Tahun 2017.
- [7] Hasyim H.A. Dardiri, Hartono Yudi. 2008. *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [8] <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/data-agregat-kependudukan/data-agregat-kependudukan-tahun-2018-semester-i>
- [9] <https://surakartakota.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab5>

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi,  
Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

- [10] Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- [11] Muatan Pendidikan Multikultural dalam Mata pelajaran PPKn 2013:Wamendikbud.
- [12] Nasikun, 1984, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- [13] Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Mulltikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 114.
- [14] Parsudi Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," *Makalah*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002. Hlm. 1
- [15] Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional.
- [16] Sartono Kartodirdjo. 1999. *Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa : Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultural*. Jakarta:Pabelan Jayakarta..
- [17] Somantri N.2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [18] Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Wertheim, W.F.1991.*Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Kajian Perubahan Sosial*. Terjemahan Misbah Zulfa Elizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [20] Winarno, dkk. *The Implementation of Pancasila through the Empowerment of Community Organization Model in Surakarta*. Prosiding Internasional seminar, UPI. Selasa, 15 Nopember 2016.
- [21] Yun, Yeogmi and Ki-cheol Park. 2011.*An Analysis of Characterictics of Korea's Multiculturalism: Politics and Prospects*. The Journal of East Asian Affairs, 25 (2), 131-161.

